

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terkait Syarat Batas Usia Calon Gubernur, Bupati Dan Walikota. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat batas usia calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan konsekuensi setelah dikeluarkan nya putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan batas usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon Namun, putusan ini masih menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut terhadap pasal mengenai syarat batas usia calon kepala daerah dan konsekuensi apa yang ditimbulkan setelah adanya putusan ini berdampak kepada masyarakat dan partai politik yang ada, adapun dampak yang ditimbulkan ialah dalam kepastian hukum, kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta implikasi terhadap partai politik yang ingin mengusung pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya revisi peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 untuk memperjelas pasal mengenai syarat batas usia calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Putusan ini memberikan banyak dampak bagi keberlangsungan pemilihan kepala daerah kedepannya.

**Kata Kunci:** Analisis Putusan, Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Calon Kepala Daerah

## ABSTRACT

*This legal research analyzes Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of Law Number 10 of 2016 on the age requirement for candidates running for Governor, Regent, and Mayor. The objective of this study is to examine and evaluate the Constitutional Court's legal reasoning in the aforementioned decision, particularly regarding the minimum age requirement for regional head candidates. The research problem focuses on the Court's judicial considerations in adjudicating the case and the legal consequences arising from the issuance of Decision Number 70/PUU-XXII/2024. This study adopts a normative juridical research method, utilizing a statutory approach and analysis of legal materials. The findings indicate that the Constitutional Court affirmed that the age requirement for regional head candidates shall be calculated from the date of official candidate pair determination. However, the decision has led to legal uncertainty and multiple interpretations, necessitating further examination of the relevant provisions. The ruling carries implications for legal certainty, public trust in state institutions, and the strategic interests of political parties intending to nominate candidates for Governor, Regent, and Mayor. In conclusion, the research underscores the need for revision of Law Number 10 of 2016 to provide clarity on the age requirement provision. This decision has considerable impact on the future conduct of regional head elections.*

**Keywords:** *Decision Analysis, Constitutional Court, Age Limit, Regional Head Candidates*